



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI** *Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN TRANSPORTASI NASIONAL JELANG NATARU 2025

Fitria Melinda

Analisis Legislatif Ahli Pertama

fitria.melinda@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah tengah mempersiapkan penyelenggaraan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) untuk memastikan kelancaran dan keamanan mobilitas masyarakat. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh moda transportasi untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang selama periode Nataru. Di sektor transportasi darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memetakan titik-titik rawan kemacetan di jalur arteri maupun jalan tol, termasuk pada ruas krusial seperti Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dan Simpang Parungkuda. Kemenhub juga menyiapkan rekayasa lalu lintas serta jalur alternatif untuk mengurangi potensi kepadatan. Pemeriksaan kelaikan kendaraan (*ramp check*) turut diperluas untuk bus antarkota dan antarprovinsi guna memastikan standar keselamatan kendaraan, serta kepatuhan terhadap sistem manajemen keselamatan pengemudi. Pengawasan terhadap angkutan pariwisata juga diperketat mengingat armada pariwisata beroperasi secara bebas tanpa melalui terminal, sehingga menyulitkan proses pemantauan.

Untuk angkutan laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub juga telah memulai pelaksanaan uji petik kelaiklautan kapal penumpang secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kapal yang beroperasi selama Nataru berada dalam kondisi laiklaut. Pelaksanaan *ramp check* dilakukan di 15 pelabuhan padat penumpang, antara lain Tanjung Perak, Makassar, Batam, Ambon, Banten, dan Sorong. Strategi ini mengedepankan prinsip *Zero Compromise for Safety* dan memastikan seluruh operator kapal mematuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Pada sektor perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyiapkan tambahan 735 personel yang ditempatkan di lokasi-lokasi rawan dan memerlukan perhatian khusus. Personel ini terdiri dari petugas pemeriksa jalur, penjaga perlintasan, serta pengawas daerah rawan. KAI juga menyiapkan perlengkapan darurat, termasuk bantalan rel, pasir, rel cadangan, peralatan penerangan, dan jembatan darurat di titik-titik prioritas. Berdasarkan data wilayah rawan KAI, terdapat 177 titik prioritas, yakni 110 titik di Pulau Jawa dan 67 titik di Pulau Sumatera.

Pada angkutan udara, insentif biaya perjalanan udara kembali disiapkan untuk menurunkan harga tiket pesawat sekitar 13–14 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan udara bagi masyarakat dan menstimulasi penggunaan moda transportasi udara selama liburan. Adapun insentif ini meliputi pemotongan PPN 6 persen yang ditanggung pemerintah, pemangkasan sejumlah komponen biaya penerbangan, termasuk biaya *fuel surcharge*, biaya kebandarudaraan, serta penurunan harga avtur di sejumlah bandara. Pemangkasan biaya penerbangan berlaku untuk periode penerbangan domestik 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, dengan periode pembelian tiket mulai 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026. Selain itu, jam operasional layanan bandara juga akan diperpanjang untuk memastikan kelancaran arus perjalanan masyarakat selama periode ini.

Sementara untuk perjalanan darat, Kementerian Pekerjaan Umum sedang menyiapkan kebijakan potensi pemberian diskon tarif tol di ruas tol untuk mempermudah mobilitas masyarakat. Infrastruktur jalan tol juga menjalani pemeliharaan rutin, disertai penambahan

fasilitas transaksi dan penguatan kapasitas tim operasional. Selain pemeliharaan rutin, pemerintah juga fokus terhadap penanganan daerah rawan longsor melalui penerapan sistem vegetasi dan teknologi stabilisasi lereng untuk menjamin keamanan jalur transportasi, seperti di ruas Medan–Berastagi.

Mengingat curah hujan tinggi diperkirakan berlangsung hingga awal 2026, upaya mitigasi risiko cuaca ekstrem semakin penting untuk mencegah genangan air dan risiko *aquaplaning* yang dapat meningkatkan potensi kecelakaan melalui pembatasan kecepatan kendaraan dan pemeriksaan tekanan ban secara rutin. Pemanfaatan data *real-time*, seperti Jasa Marga Integrated Digitalmap, dapat membantu memprediksi pergerakan kendaraan, sehingga rekayasa lalu lintas dapat diterapkan secara tepat waktu dan lebih efektif. Dengan kesiapan personel, pemeliharaan infrastruktur, pengawasan ketat, serta pemanfaatan data *real-time*, pemerintah berupaya memastikan arus perjalanan selama libur Nataru berlangsung aman dan lancar. Upaya ini diharapkan tidak hanya menjaga keselamatan pengemudi dan penumpang, tetapi juga memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman di seluruh moda transportasi.

Atensi DPR

Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan strategi komprehensif untuk memastikan keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Pengelolaan moda transportasi darat, laut, dan perkeretaapian, termasuk pemetaan titik rawan, penambahan personel, *ramp check* kendaraan dan kapal, serta pemeliharaan infrastruktur. Di sektor transportasi udara, akan ada wacana pemberian insentif biaya tiket pesawat agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap mitigasi risiko cuaca ekstrem dan pemanfaatan data *real-time* sangat penting untuk mengurangi potensi kecelakaan. Komisi V DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap kesiapan infrastruktur berikut sarana dan prasarana di berbagai moda transportasi untuk memastikan semua persiapan dilakukan secara optimal untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pemudik dalam perjalanan selama periode Nataru. Untuk itu Komisi V DPR RI perlu mendorong koordinasi antarlembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Korlantas Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan pemerintah daerah, dalam mengelola arus lalu lintas dan potensi bencana.

Sumber

antaranews.com, 12 November 2025;
dephub.go.id, 12 November 2025;
kompas.id, 11 November 2025;
kontan.co.id, 11 November 2025; dan
tempo.co, 12 November 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*